



**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil**

**Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020**

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**

Daftar Isi

Halaman

Surat Pernyataan Pengurus

Laporan Auditor Independen

**Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020**

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Penghasilan Komprehensif	2
Laporan Perubahan Aset Neto	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan Atas Laporan Keuangan	5

**Surat Pernyataan Pengurus
Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
PT Kereta Api Indonesia (Persero)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bachoirullazi
Alamat Kantor : Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung
Alamat Domisili : Jalan KH. Balqi Komp. Permata Hijau Blok B2 No.11/12 Kel. Silaberanti
Kec. Jakabaring Palembang
No. Telepon : 081273304343
Jabatan : PLT Vice President Corporate Social Responsibility

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Kereta Api Indonesia (Persero);
2. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bandung, 18 Februari 2022



Bachoirullazi

PLT Vice President Corporate Social Responsibility

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

Nomor : 00083/2.1030/AU.2/12/0501-1/1/II/2022

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 215140 1340
F +62 215140 1350

www.rsm.id

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi, serta
Pengelola Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(dahulu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan)
PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Kami telah mengaudit laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (dahulu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) PT Kereta Api Indonesia (Persero), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lain.

Tanggung jawab pengelola atas laporan keuangan

Pengelola Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (dahulu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Pengelola untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh pengelola, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Kereta Api Indonesia (Persero) tanggal 31 Desember 2021, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan**Rudi Hartono Purba**

Nomor Izin Akuntan Publik: AP. 0501

Jakarta, 18 Februari 2022



00083

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
LAPORAN POSISI KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Rupiah Penuh)

	<u>Catatan</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ASET			
Aset Lancar			
Bank	4	252.943.786	154.128.415
Piutang Pinjaman Mitra Binaan, setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp5.538.690.853 pada tahun 2021 dan Rp1.960.215.905 pada tahun 2020	5	16.880.334.067	20.258.024.810
Piutang Lain-lain, setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp100.915.333 pada tahun 2021 dan Rp166.504.418 pada tahun 2020	6	1.241.560.693	1.012.416.861
Piutang Bermasalah, setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp2.706.889.536 pada tahun 2021 dan Rp2.691.438.926 pada tahun 2020	7	--	--
JUMLAH ASET		<u>18.374.838.546</u>	<u>21.424.570.086</u>
LIABILITAS DAN ASET NETO			
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Kelebihan Pembayaran Angsuran	8	31.214.176	35.034.447
ASET NETO			
Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	9	18.343.624.370	21.389.535.639
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		<u>18.374.838.546</u>	<u>21.424.570.086</u>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2021	2020 *)
TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA			
PENDAPATAN			
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	10	540.747.479	399.480.088
Pendapatan Bunga Bank	11	20.080.111	17.280.189
Pendapatan Lain-lain	12	70.879.085	1.368.641.186
Alokasi Bagian Laba dari BUMN Pembina	13	--	17.538.148.867
JUMLAH PENDAPATAN		631.706.675	19.323.550.330
BEBAN			
Beban Penyisihan Piutang	14	3.611.962.673	989.274.122
Dana Pembinaan Kemitraan	15	--	851.700.000
Beban Penghapusan Piutang	16	59.100.205	--
Beban Administrasi Umum	17	6.555.066	6.019.791
Penyaluran - Bina Lingkungan	18	--	17.538.148.867
JUMLAH BEBAN		3.677.617.944	19.385.142.780
DEFISIT		(3.045.911.269)	(61.592.450)
DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		--	--
JUMLAH KERUGIAN KOMPREHENSIF LAIN		(3.045.911.269)	(61.592.450)

*) Direklasifikasi, lihat Catatan 21.

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Rupiah Penuh)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ASET NETO TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo Awal	21.389.535.639	21.451.128.089
Sumbangan	(3.045.911.269)	(61.592.450)
SALDO AKHIR	<u>18.343.624.370</u>	<u>21.389.535.639</u>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	--	--
ASET NETO DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA	--	--
JUMLAH ASET NETO	<u><u>18.343.624.370</u></u>	<u><u>21.389.535.639</u></u>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dalam Rupiah Penuh)

	<u>Catatan</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
AKTIVITAS OPERASI			
KAS DITERIMA DARI:			
Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan	19	6.815.851.118	6.712.038.363
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	10	540.747.479	399.480.088
Pendapatan Bunga Deposito/Jasa Giro	11	20.080.111	17.280.189
Penerimaan Dana BUMN Pembina	13	--	17.538.148.867
(Kekurangan) Kelebihan Pembayaran Angsuran	8	(3.820.271)	50.818
Pendapatan Lain	12	187.000	--
JUMLAH PENERIMAAN		<u>7.373.045.437</u>	<u>24.666.998.325</u>
KAS DIKELUARKAN UNTUK:			
Penyaluran Pinjaman Kemitraan	19	(7.120.575.000)	(6.190.000.000)
Piutang Pembinaan	6	(147.100.000)	--
Dana Pembinaan Kemitraan	15	--	(851.700.000)
Beban Administrasi dan Umum	17	(6.555.066)	(6.019.791)
Penyaluran Bina Lingkungan	18	--	(17.538.148.867)
JUMLAH PENGELUARAN		<u>(7.274.230.066)</u>	<u>(24.585.868.658)</u>
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI AKTIVITAS OPERASI		<u>98.815.371</u>	<u>81.129.667</u>
AKTIVITAS INVESTASI			
		--	--
AKTIVITAS PENDANAAN			
		--	--
KENAIKAN BERSIH DALAM BANK		98.815.371	81.129.667
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN		154.128.415	72.998.748
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN		<u>252.943.786</u>	<u>154.128.415</u>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dalam Rupiah Penuh)

1. Umum

1.a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Kereta Api Indonesia (Persero) ikut melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) mulai tahun 1996 yang semula disebut Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL), pada saat itu dinamakan Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) sekarang menjadi Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK), dengan wilayah binaan meliputi Provinsi : Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta dan Jawa Timur. Pada tahun 2021, perubahan nama menjadi Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/04/2021, tanggal 8 April 2021, tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Sesuai dengan Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. PER.U/KO.104/II/2/KA- 2019, tanggal 13 Februari 2019, tentang : Perubahan atas Peraturan Direksi Nomor : PER.U/KO.104/II/3/KA-2018 tentang Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Perusahaan. Pengelolaan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil di bawah pembinaan Direktur Utama dan Sekretaris Perusahaan. Sedangkan pengelolaan di daerah dibentuk Komite PUMK Daerah secara fungsional sesuai Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor : PER.U/KP.502/IX/1/KA-2020 tanggal 23 September 2020 perihal Perubahan atas Peraturan Direksi Nomor PER.U/KP.502/X/1/KA-2019 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dengan tujuan agar pengelolaan PUMK lebih efektif dan efisien dengan prinsip *Good Corporate Governance*.

1.b. Kegiatan Utama

Kegiatan PUMK di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dilakukan melalui jaringan kantor yang terdiri dari Kantor Pusat, 9 (sembilan) kantor Daerah Operasi dan 4 (empat) Divisi Regional dengan pembagian wilayah binaan dan jumlah mitra binaan pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

<u>Cabang / Pusat</u>	<u>Unit Kerja</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Sumatera	Kantor Wilayah di Palembang	273	263
DKI Jakarta	Kantor Wilayah di Jakarta	86	85
Jawa Barat	Kantor Wilayah di Bandung dan Cirebon	673	632
Jawa Tengah	Kantor Wilayah di Semarang dan Purwokerto	499	470
DI Yogyakarta	Kantor Wilayah di Yogyakarta	354	352
Jawa Timur	Kantor Wilayah di Madiun, Surabaya dan Jember	759	729
Jumlah Mitra Binaan		2.644	2.531

Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Program untuk meningkatkan kemampuan para pelaku usaha mikro dan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri:

- Membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan.
- Membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.

Program Bina Lingkungan

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang peralihannya, penyaluran program yang sudah dilaksanakan dan belum selesai sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian pelaksanaan penyaluran program tersebut. Saldo dana Program Bina Lingkungan telah digunakan sehingga saldo tersebut habis dan Perusahaan telah menutup rekening Program Bina Lingkungan pada tahun 2020 sesuai dengan arahan Kementerian BUMN yang tertuang di Risalah Rapat Kementerian BUMN No: RIS-60/D7.MBU.3/11/2019 tanggal 27 November 2019.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Rupiah Penuh)

1.c. Susunan Pengurus

Berdasarkan PER.U/KO/104/I/3/KA-2018, tanggal 09 Januari 2018, tentang Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero), secara rinci Susunan Pengurus PUMK (dahulu PKBL) tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
EVP Corporate Secretary	Asdo Artriviyanto	R Dadan Rudiansyah
VP Corporate Social Responsibility	Agus Setijono	Agus Setijono
Manager Partnership and Participations	Sandra Pridaswara	Sandra Pridaswara
Manager Community Relations	Noxy Citrea Bridara	Noxy Citrea Bridara

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

2.a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan pengelolaan dana PUMK disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012 sesuai dengan Surat Edaran BUMN Nomor: SE-02/MBU/Wk/2012 tanggal 23 Februari 2012 yang bentuk penyajiannya mengacu pada Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35 (Revisi 2019) "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba" yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan pengelolaan dana PUMK disusun dalam mata uang rupiah, menggunakan konsep harga perolehan. Laporan Arus Kas disusun dengan menggunakan metode langsung dan dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Laporan keuangan disusun menggunakan dasar akrual kecuali laporan arus kas disusun menggunakan dasar kas dengan menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas. Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, yang disusun menggunakan metode langsung (*direct method*).

Laporan keuangan PUMK Perusahaan meliputi:

- (i) Laporan Posisi Keuangan
Menyajikan informasi Aset, Kewajiban, dan Aset Neto PUMK pada periode tertentu.
- (ii) Laporan Penghasilan Komprehensif
Menyajikan kenaikan/penurunan Aset Neto pada tahun berjalan yang merupakan selisih antara dana yang diterima dengan penggunaan dana PUMK selama periode berjalan. Jumlah kenaikan/penurunan ini selanjutnya akan menjadi bagian dari Aset Neto pada periode berjalan.
- (iii) Laporan Perubahan Aset Neto
Menyajikan perubahan jumlah aset neto (Aset Neto Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya dan Aset Neto Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya) selama suatu periode yang mencakup organisasi secara keseluruhan
- (iv) Laporan Arus Kas
Menyajikan laporan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan Arus Kas PUMK disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*).
- (v) Catatan Atas Laporan Keuangan
Setiap pos dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, dan Laporan Arus Kas harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Rupiah Penuh)

2.b. Bank

Kas dan Bank didefinisikan sebagai kas dan bank dengan periode penempatan kurang atau sama dengan 3 (tiga) bulan yang dimiliki sampai dengan saat jatuh tempo, tidak dibatasi penggunaannya dan tidak dijamin.

2.c. Piutang Pinjaman Mitra Binaan

Terdiri dari:

1. Piutang Bersih

Piutang bersih adalah jumlah piutang pinjaman mitra binaan dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang yang dihitung 2 (dua) tahun kebelakang. Penyaluran pinjaman kepada mitra binaan dicatat sebagai piutang sebesar nilai pokok pinjaman yang diberikan dikurangi dengan penerimaan angsuran pokok pinjaman. Jasa Administrasi dari pinjaman akan dicatat sebagai penghasilan pada periode diterimanya pendapatan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No: PER-05/MBU/04/2021, tanggal 8 April 2021, tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, besarnya Jasa Administrasi pinjaman dapat dirinci sebagai berikut :

- Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) per tahun sebesar 6% (enam persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun;
- Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip jual beli maka proyeksi marjin yang dihasilkan disetarakan dengan marjin sebesar 6% (enam persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun;
- Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN Pembina adalah mulai dari 10% (10 : 90) sampai dengan maksimal 50% (50 : 50) berdasarkan perjanjian.

2. Piutang Lain-lain Bersih

Piutang lain-lain bersih adalah jumlah piutang jasa administrasi dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang jasa administrasi yang dihitung 2 (dua) tahun kebelakang.

Penyisihan Penurunan nilai Piutang dihitung sesuai tarif penyisihan menggunakan rata-rata prosentase pergerakan piutang pinjaman mitra binaan berdasarkan umur tunggakan. Perhitungan persentase (%) tarif penyisihan akan berubah sesuai umur tunggakan.

2.d. Piutang Bermasalah

Piutang bermasalah disajikan sebesar Nilai Pokok Pinjaman. Besarnya Alokasi Penyisihan adalah sebesar 100% dari saldo Piutang Bermasalah.

2.e. Aset Neto Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya

Aset Neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.

2.f. Alokasi Bagian Laba dari BUMN Pembina

Mengungkapkan jumlah alokasi laba yang telah disetujui oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) untuk mendanai kegiatan PKBL, jumlah realisasi alokasi laba yang telah dipenuhi oleh BUMN Pembina, dan pengungkapan lainnya yang relevan yang berakhir di tahun 2020.

2.g. Pendapatan

Jasa Administrasi Pinjaman

Mengungkapkan pendapatan jasa yang dipungut atas pinjaman dana Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) yang disalurkan kepada Mitra Binaan, termasuk Pinjaman Khusus.

Pinjaman yang diberikan kepada mitra binaan dibebankan bunga pinjaman atau jasa administrasi berdasarkan kelompok jumlah penyaluran pokok pinjaman sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN, ditetapkan per tahun sebesar 3% (tiga persen) dari limit pinjaman atau ditetapkan lain oleh Menteri.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Rupiah Penuh)

Pendapatan Bunga

Mengungkapkan pendapatan yang berasal dari bunga deposito, jasa giro, bunga tabungan atau bunga simpanan lainnya.

Pendapatan Lainnya

Merupakan perkiraan yang menampung pendapatan PUMK yang tidak dapat dikategorikan pada pos lainnya termasuk pemulihan atas piutang.

Alokasi Bagian Laba dari BUMN Pembina

Merupakan alokasi dana dari perusahaan untuk PKBL yang berakhir tahun 2020.

2.h. Penyaluran, Beban dan Pengeluaran

Beban diakui pada saat terjadinya, sedangkan pengeluaran diakui pada saat kas keluar.

Dana Pembinaan Kemitraan

Merupakan jumlah dana yang dibayarkan dalam rangka pelaksanaan pembinaan kemitraan antara lain bantuan pendidikan, pelatihan, promosi, pengkajian dan penelitian serta kegiatan lain.

Beban Administrasi dan Umum

Merupakan beban-beban yang terjadi karena adanya biaya administrasi dalam transaksi bank dan juga beban yang berkaitan atas Pajak Penghasilan.

Penyaluran Bina Lingkungan

Merupakan penyaluran dana Unit PKBL sebagai bentuk pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang berakhir tahun 2020.

3. Penilaian Kinerja

3.a. Efektivitas Penyaluran Dana

Aspek kinerja ini diukur melalui rasio (dalam persentase) antara jumlah dana yang disalurkan dan jumlah dana yang tersedia sesuai dengan Surat Menteri BUMN No: S-723/MBU/2013 tertanggal 3 Desember 2013. Indikator yang ditetapkan untuk menilai kinerja penyaluran dana Program Kemitraan pada tahun 2013 dapat diberikan penyesuaian dengan nilai skor 3 sedangkan sesuai Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002, tanggal 4 Juni 2002, sebagai berikut:

<u>Penyerapan (%)</u>	<u>>90</u>	<u>85 s/d 90</u>	<u>80 s/d 85</u>	<u><80</u>
Skor	3	2	1	0

3.b. Tingkat Kolektibilitas Piutang

Aspek kinerja ini diukur melalui rasio (dalam persentase) antara jumlah Nilai Tertimbang (NT) dan jumlah piutang mitra binaan sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002, tanggal 4 Juni 2002. Indikator yang ditetapkan untuk menilai kinerja penyaluran dana tersebut adalah sebagai berikut:

<u>Tingkat Kolektibilitas (%)</u>	<u>>70</u>	<u>40 s/d 70</u>	<u>10 s/d 40</u>	<u><10</u>
Skor	3	2	1	0

Nilai Tertimbang (NT) diperoleh dari penjumlahan hasil perkalian nilai piutang mitra binaan dengan nilai bobot kolektibilitas masing-masing piutang.

Nilai bobot yang dipergunakan sebagai angka pengali adalah 100% untuk piutang dengan kategori Lancar, 75% untuk kategori Kurang Lancar, 25% untuk kategori Diragukan dan 0% untuk kategori Macet.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Rupiah Penuh)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-05/MBU/04/2021, tanggal 8 April 2021, tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, penggolongan kualitas pinjaman ditetapkan sebagai berikut:

- i) Lancar
apabila pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- ii) Kurang Lancar
apabila pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- iii) Diragukan
apabila pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- iv) Macet
apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

Pinjaman mitra binaan yang dikelompokkan sebagai piutang bermasalah yang timbul karena kahar (*force majeure*) sehingga tidak perlu dilakukan tindakan penyehatan pinjaman menurut Surat Kementerian BUMN No. PER-05/MBU/04/2021, tanggal 8 April 2021 merupakan pengurang (tidak diperhitungkan) dalam perhitungan kinerja kolektibilitas piutang.

4. Bank

Bank terdiri dari rekening tabungan pada PT Bank Negara Indonesia Tbk atas program pendanaan usaha mikro dan usaha kecil dengan saldo pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp252.943.786 dan Rp154.128.415.

5. Piutang Pinjaman Mitra Binaan

Piutang pinjaman mitra binaan berdasarkan sektor:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Sektor Perdagangan	8.274.942.277	6.477.304.157
Sektor Industri	5.818.767.983	6.220.041.368
Sektor Peternakan	3.017.205.670	3.594.690.230
Sektor Pertanian	2.315.446.852	3.378.042.044
Sektor Jasa	1.481.691.433	1.118.777.429
Sektor Perikanan	660.231.655	1.342.518.653
Sektor Lainnya	850.739.050	86.866.834
Sub Jumlah	<u>22.419.024.920</u>	<u>22.218.240.715</u>
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(5.538.690.853)	(1.960.215.905)
Jumlah Piutang Bersih	<u>16.880.334.067</u>	<u>20.258.024.810</u>

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Rupiah Penuh)

Piutang pinjaman mitra binaan berdasarkan Daerah Operasi (DAOP) dan Divisi Regional (DIVRE) sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
DAOP 1 Jakarta	1.900.924.601	1.603.527.125
DAOP 2 Bandung	3.839.873.801	3.280.233.934
DAOP 3 Cirebon	2.063.089.523	2.401.482.819
DAOP 4 Semarang	1.606.286.234	1.036.017.211
DAOP 5 Purwokerto	1.383.378.114	1.484.771.268
DAOP 6 Yogyakarta	2.972.552.464	3.110.965.002
DAOP 7 Madiun	2.023.113.016	1.765.676.164
DAOP 8 Surabaya	1.909.504.250	2.571.189.873
DAOP 9 Jember	2.073.612.900	1.989.961.500
DIVRE I Medan	472.937.069	434.000.763
DIVRE II Padang	849.069.803	1.131.013.000
DIVRE III Palembang	481.768.108	586.757.676
DIVRE IV Tanjung Karang	842.915.037	822.644.380
Jumlah Piutang	22.419.024.920	22.218.240.715
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(5.538.690.853)	(1.960.215.905)
Piutang Bersih	16.880.334.067	20.258.024.810

Kualitas piutang pinjaman mitra binaan sebagai berikut:

2021				
<u>Kualitas Pinjaman</u>	<u>Umur Piutang (Jatuh Tempo)</u>	<u>Saldo Piutang</u>	<u>Persentase Penyisihan</u>	<u>Cadangan Penurunan Nilai</u>
Lancar	0 - 30	16.263.238.612	0,33% - 18,04%	1.082.344.807
Kurang Lancar	31 - 180	1.318.996.157	0,46% - 23,85%	314.580.583
Diragukan	181 - 270	958.258.222	0,70% - 27,47%	263.233.534
Macet	> 270	3.878.531.929	100%	3.878.531.929
Jumlah		22.419.024.920		5.538.690.853
2020				
<u>Kualitas Pinjaman</u>	<u>Umur Piutang (Jatuh Tempo)</u>	<u>Saldo Piutang</u>	<u>Persentase Penyisihan</u>	<u>Cadangan Penurunan Nilai</u>
Lancar	0 - 30	16.081.665.096	0,43% - 13,11%	386.702.155
Kurang Lancar	31 - 180	3.563.331.788	1,95% - 18,52%	156.855.222
Diragukan	181 - 270	1.341.054.649	4,68% - 24,12%	184.469.346
Macet	> 270	1.232.189.182	100%	1.232.189.182
Jumlah		22.218.240.715		1.960.215.905

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang mitra binaan sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Saldo Awal	1.960.215.905	3.328.857.091
Penambahan Tahun Berjalan	3.591.322.063	--
Pemulihan Tahun Berjalan	(12.847.115)	(1.368.641.186)
Saldo Akhir	5.538.690.853	1.960.215.905

Pemulihan pada tahun 2021 sebesar Rp12.847.115 merupakan penyesuaian yang dilakukan oleh pengurus atas saldo piutang pinjaman mitra binaan.

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dalam Rupiah Penuh)

6. Piutang Lain-lain

	2021	2020
Piutang Jasa Administrasi Pinjaman Bersih	1.094.460.693	1.012.416.861
Piutang Pembinaan	147.100.000	--
Saldo Akhir	1.241.560.693	1.012.416.861

Piutang Pembinaan merupakan biaya pembinaan yang sudah dikeluarkan dari dana PUMK dan akan ditagihkan ke Perusahaan. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No: PER-05/MBU/04/2021 pasal 21 (b) bahwa biaya pembinaan menjadi bagian dari program TJSL.

Rincian piutang jasa administrasi pinjaman sebagai berikut:

	2021	2020
DAOP 1 Jakarta	96.623.851	58.636.423
DAOP 2 Bandung	198.300.202	172.391.362
DAOP 3 Cirebon	98.896.235	139.181.599
DAOP 4 Semarang	119.087.506	74.461.449
DAOP 5 Purwokerto	74.501.148	60.981.366
DAOP 6 Yogyakarta	143.751.691	150.962.743
DAOP 7 Madiun	121.391.873	66.136.333
DAOP 8 Surabaya	91.442.589	146.719.438
DAOP 9 Jember	121.967.443	115.412.250
DIVRE I Medan	20.091.746	16.263.348
DIVRE II Padang	20.065.795	79.166.000
DIVRE III Palembang	43.983.440	44.380.968
DIVRE IV Tanjungkarang	45.272.507	54.228.000
Jumlah Piutang	1.195.376.026	1.178.921.279
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(100.915.333)	(166.504.418)
Piutang Jasa Administrasi Pinjaman Bersih	1.094.460.693	1.012.416.861

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang jasa administrasi pinjaman sebagai berikut:

	2021	2020
Saldo Awal	166.504.418	36.339.456
Penambahan Tahun Berjalan	--	145.020.875
Pemulihan Tahun Berjalan	(65.589.085)	(14.855.913)
Saldo Akhir	100.915.333	166.504.418

7. Piutang Bermasalah

Piutang bermasalah merupakan pinjaman modal kerja yang diberikan kepada mitra binaan yang masuk kedalam piutang bermasalah dengan rincian sebagai berikut:

	2021	2020
Sektor Industri	661.509.778	662.509.778
Sektor Perdagangan	743.627.297	727.892.187
Sektor Pertanian	648.263.750	648.263.750
Sektor Peternakan	102.443.626	102.443.626
Sektor Perikanan	126.310.048	126.310.048
Sektor Jasa	424.735.037	424.019.537
Jumlah	2.706.889.536	2.691.438.926
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(2.706.889.536)	(2.691.438.926)
Piutang bermasalah bersih	--	--

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Rupiah Penuh)

Mutasi cadangan kerugian nilai piutang sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Saldo Awal	2.691.438.926	1.832.329.766
Penambahan Tahun Berjalan	20.640.610	859.109.160
Pemulihan Tahun Berjalan	(5.190.000)	--
Saldo Akhir	<u>2.706.889.536</u>	<u>2.691.438.926</u>

8. Kelebihan Pembayaran Angsuran

Kelebihan pembayaran angsuran merupakan kelebihan pembayaran angsuran pinjaman Mitra Binaan yang telah disetor ke Rekening Program Kemitraan yang terdiri dari:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Saldo Awal	35.034.447	34.983.629
Kelebihan Pembayaran Angsuran Tahun Berjalan	4.031.575	3.280.144
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Angsuran	(7.851.846)	(3.229.326)
Jumlah	<u>31.214.176</u>	<u>35.034.447</u>

Kelebihan pembayaran angsuran per Daerah Operasi (DAOP) dan Divisi Regional (DIVRE) sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
DAOP 1 Jakarta	1.456.700	1.456.700
DAOP 2 Bandung	3.798.851	3.798.851
DAOP 3 Cirebon	450.898	3.451.243
DAOP 5 Purwokerto	8.025.724	8.460.170
DAOP 6 Yogyakarta	7.055.034	7.055.034
DAOP 7 Madiun	1.529.166	1.529.166
DAOP 8 Surabaya	5.252.540	5.761.540
DAOP 9 Jember	1.479.020	1.479.020
DIVRE I Medan	299.242	181.723
DIVRE II Padang	6.001	--
DIVRE III Palembang	1.857.000	1.857.000
DIVRE IV Tanjungkarang	4.000	4.000
Jumlah	<u>31.214.176</u>	<u>35.034.447</u>

9. Aset Neto

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Saldo Awal	21.389.535.639	21.451.128.089
Penurunan Aset Neto Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	(3.045.911.269)	(61.592.450)
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	--	--
Jumlah Aset Neto Akhir Tahun	<u>18.343.624.370</u>	<u>21.389.535.639</u>

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Rupiah Penuh)

10. Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
DAOP 1 Jakarta	49.757.034	17.408.222
DAOP 2 Bandung	96.001.508	49.542.375
DAOP 3 Cirebon	12.160.238	51.518.336
DAOP 4 Semarang	61.542.634	18.001.111
DAOP 5 Purwokerto	50.274.820	39.052.175
DAOP 6 Yogyakarta	51.892.498	39.435.941
DAOP 7 Madiun	102.915.832	49.021.469
DAOP 8 Surabaya	2.382.153	34.458.029
DAOP 9 Jember	43.710.819	32.595.000
DIVRE I Medan	22.518.434	6.428.662
DIVRE II Padang	32.034.384	35.199.000
DIVRE III Palembang	6.360.701	6.597.268
DIVRE IV Tanjungkarang	9.196.424	20.222.500
Jumlah	<u>540.747.479</u>	<u>399.480.088</u>

11. Pendapatan Bunga Bank

Pendapatan bunga bank merupakan pendapatan yang berasal dari jasa giro dengan saldo pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp20.080.111 dan Rp17.280.189.

12. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain merupakan pendapatan PUMK yang tidak dapat dikategorikan pada pos lainnya termasuk pemulihan atas piutang dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Pemulihan Penyisihan Piutang		
Piutang Pinjaman (Catatan 5)	--	1.368.641.186
Piutang Jasa Administrasi Pinjaman (Catatan 6)	65.589.085	--
Piutang Bermasalah (Catatan 7)	5.190.000	--
Pendapatan Lain	100.000	--
Jumlah	<u>70.879.085</u>	<u>1.368.641.186</u>

Sesuai dengan Surat Edaran Kementrian BUMN No: SE-02/MBU/Wk/2012 penetapan pedoman akuntansi PKBL Bab 7.7 Termasuk dalam Pendapatan Lain-Lain di antaranya pemulihan cadangan penyisihan piutang.

13. Alokasi Dana dari BUMN Pembina

Alokasi bagian Laba dari BUMN Pembina atas Program Bina Lingkungan 2020 sebesar Rp17.538.148.867. Merupakan jumlah yang diterima Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dari penyisihan laba PT Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan Risalah RUPS PT Kereta Api Indonesia (Persero) tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Nomor RIS-2/D4.MBU/01/2020 tanggal 22 Januari 2020 dan Persetujuan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Nomor S-1080/MBU/11/2020 tanggal 25 November 2020.

Berdasarkan peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN atas perubahan peraturan menteri BUMN No: PER-09/MBU/04/2021 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Bab III pasal 11 point 1: dalam melaksanakan Program TJSL BUMN, BUMN dapat melakukan Program Pendanaan usaha mikro dan usaha kecil.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Rupiah Penuh)

14. Beban Penyisihan Piutang

	2021	2020
Penyisihan Piutang Pinjaman (Catatan 5)	3.591.322.063	--
Penyisihan Piutang Jasa Administrasi Pinjaman (Catatan 6)	--	130.164.962
Penyisihan Piutang Bermasalah (Catatan 7)	20.640.610	859.109.160
Jumlah	3.611.962.673	989.274.122

15. Dana Pembinaan Kemitraan

Dana pembinaan kemitraan merupakan dana pembinaan kemitraan yang diberikan kepada mitra binaan dalam bentuk pameran, pelatihan/manajemen kewirausahaan pada sektor Jasa, Industri dan sektor lainnya pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp851.700.000, pada tahun 2021 sesuai dengan Arahan Kementerian BUMN No. S-165/DSI.MBU/08/2021 point 1 (b) Beban pembinaan program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) tidak lagi menggunakan dana bergulir namun dibebankan kepada perusahaan sebagai bagian dari anggaran program TJSL

16. Beban Penghapusan Piutang Lain-lain

Beban penghapusan piutang lain-lain merupakan piutang jasa administrasi pinjaman yang tidak terdapat dalam saldo piutang jasa administrasi, sudah dalam kategori tidak lancar dan macet pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp59.100.205.

17. Beban Administrasi dan Umum

Beban administrasi dan umum merupakan beban program kemitraan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 6.555.066 dan Rp6.019.791.

18. Penyaluran Dana Bina Lingkungan

Penyaluran dana bina lingkungan merupakan dana kegiatan sosial tahun 2020 yang ditujukan untuk membantu masyarakat di lingkungan sekitar Perusahaan. Penyaluran Dana Bina Lingkungan untuk fasilitas umum, sarana ibadah dan lembaga pendidikan, dengan rincian sebagai berikut:

Cabang/ Pusat	2020							Jumlah
	Korban Bencana Alam	Pendidikan	Bantuan Peningkatan Kesehatan	Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum	Sarana Ibadah	Pelestarian Alam	Bantuan Sosial Kemasyarakatan	
Kantor Pusat	4.267.428.079	833.003.646	10.000.000	906.800.000	1.033.412.000	180.000.000	315.750.000	7.546.393.725
DAOP 1 Jakarta	147.000.000	147.100.000	140.000.000	50.000.000	296.175.000	--	125.000.000	905.275.000
DAOP 2 Bandung	96.558.000	95.000.000	122.222.497	75.000.000	482.248.550	--	--	871.029.047
DAOP 3 Cirebon	88.364.250	60.000.000	139.053.139	75.000.000	114.670.000	120.000.000	--	597.087.389
DAOP 4 Semarang	125.564.750	163.289.000	103.000.000	157.620.000	195.616.000	--	30.000.000	775.089.750
DAOP 5 Purwokerto	101.723.000	210.770.000	71.600.000	77.200.000	51.656.800	--	97.626.000	610.575.800
DAOP 6 Yogyakarta	95.000.000	328.463.000	142.100.440	206.020.000	32.100.000	--	140.000.000	943.683.440
DAOP 7 Madiun	83.500.000	119.927.000	62.400.000	209.750.000	47.434.000	92.500.000	75.000.000	690.511.000
DAOP 8 Surabaya	100.317.230	103.900.000	56.444.000	135.000.000	105.710.750	44.638.000	75.000.000	621.009.980
DAOP 9 Jember	70.000.000	50.000.000	49.500.000	75.000.000	35.200.000	--	--	279.700.000
DIVRE I Medan	144.850.000	321.819.000	200.000.000	50.000.000	71.028.350	30.000.000	32.919.000	850.616.350
DIVRE II Padang	122.464.286	--	--	--	240.200.000	--	75.000.000	437.664.286
DIVRE III Palembang	220.000.000	15.000.000	469.690.000	406.125.000	95.000.000	55.000.000	115.000.000	1.375.815.000
DIVRE IV Tanjungkarang	95.000.000	131.223.000	424.593.900	238.320.000	134.686.200	9.875.000	--	1.033.698.100
Jumlah	5.757.769.595	2.579.494.646	1.990.603.976	2.661.835.000	2.935.137.650	532.013.000	1.081.295.000	17.538.148.867

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Rupiah Penuh)

19. Tingkat Efektivitas Penyaluran Dana Pinjaman Kemitraan

Penilaian kinerja program kemitraan dan bina lingkungan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. Kep.100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 mencakup Program Kemitraan dengan Indikator Tingkat Efektivitas penyaluran dan Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman.

Tingkat efektivitas penyaluran dana dihitung dengan cara membagi jumlah dana yang disalurkan dengan jumlah dana yang tersedia. Jumlah dana yang disalurkan adalah seluruh dana yang disalurkan kepada usaha kecil dan koperasi dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri dari pinjaman modal kerja. Sedangkan jumlah dana yang tersedia terdiri dari saldo awal periode ditambah dengan pengembalian pinjaman (pokok ditambah bunga) dan pendapatan bunga dari program kemitraan.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Jumlah Dana yang Tersedia		
Saldo Awal Tahun	154.128.415	72.998.748
Pengembalian angsuran Pokok Pinjaman	6.815.851.118	6.712.038.363
Pendapatan Jasa Giro	20.080.111	17.280.189
Pendapatan Jasa Administrasi	540.747.479	399.480.088
Jumlah	<u>7.530.807.123</u>	<u>7.201.797.388</u>
Jumlah Dana yang Disalurkan		
Penyaluran Pinjaman Mitra Binaan	7.070.575.000	6.240.000.000
Dana Pembinaan Kemitraan	--	851.700.000
Jumlah	<u>7.070.575.000</u>	<u>7.091.700.000</u>
Rasio Penyerapan Dana		
Jumlah Dana yang Disalurkan	93,89%	98,47%
Jumlah Dana yang Tersedia		
Skor	3	3

Pada tanggal 28 Desember 2020, Perusahaan mendandatangani perjanjian penyaluran pinjaman Mitra Binaan senilai Rp50.000.000 dengan nomor kontrak KJ.205/XII/13/DO.6-2020. Proses penyaluran pinjaman mengalami gagal transfer pada tanggal 31 Desember 2020, dan berhasil dilakukan transfer kembali pada tanggal 5 Januari 2021.

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002, perhitungan efektivitas penggunaan dana tahun 2021 dan 2020 masing-masing adalah 93,89% dan 98,47% dengan Skor 3 (tiga) dan 3 (tiga).

20. Tingkat Kolektibilitas Penyaluran Dana Pinjaman Kemitraan

Indikator lain dalam penilaian kinerja program pendanaan usaha mikro dan usaha kecil yaitu tingkat Kolektibilitas pengembalian pinjaman yang mana memberi indikasi kemungkinan tertagihnya suatu pinjaman. Tingkat Kolektibilitas pengembalian pinjaman merupakan perbandingan antara rata-rata tertimbang Kolektibilitas pinjaman terhadap jumlah pinjaman yang disalurkan (saldo pinjaman). Rata-rata tertimbang Kolektibilitas pinjaman adalah perkalian antara bobot kolektibilitas dengan saldo pinjaman berdasarkan kualitas pinjaman.

	Nilai Bobot Kolektibilitas	2021		2020	
		Nominal IDR	N.T*) IDR	Nominal IDR	N.T*) IDR
Kolektibilitas Piutang					
Lancar	100%	16.263.238.612	16.263.238.612	16.081.665.096	16.081.665.096
Kurang Lancar	75%	1.318.996.157	989.247.118	3.563.331.788	2.672.498.841
Diragukan	25%	958.258.222	239.564.556	1.341.054.649	335.263.662
Macet	0%	3.878.531.929	--	1.232.189.182	--
Jumlah Piutang Mitra Binaan		<u>22.419.024.920</u>	<u>17.492.050.286</u>	<u>22.218.240.715</u>	<u>19.089.427.599</u>
Rasio Kolektibilitas Piutang (=N.T./Nominal)		78,02%		85,92%	
Skor		3		3	

*) N.T (Nilai Tertimbang) = nominal x nilai bobot kolektibilitas masing-masing kategori piutang

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Rupiah Penuh)

Sesuai dengan hasil perhitungan maka presentase kolektibilitas pengembalian pinjaman pada tahun 2021 dan 2020 sebesar 78,02% dan 85,92% Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002, maka pada tahun 2021 dan 2020 masing-masing mendapat Skor 3 (tiga) dan 3 (tiga).

21. Reklasifikasi

Akun-akun tertentu pada laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah direklasifikasi untuk menyesuaikan dengan penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

	2020	
	Sebelum Reklasifikasi	Sesudah Reklasifikasi
Laporan Penghasilan Komprehensif Pendapatan		
Pendapatan Lain-lain	--	1.368.641.186
Beban		
Beban (Pemulihan) Penyisihan Piutang	(379.367.064)	989.274.122

22. Peraturan Menteri BUMN yang berlaku sampai dengan Tahun Buku 2021

- a. Pada tahun 2015 terdapat 2 (dua) kali perubahan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 03 Juli 2015 atas perubahan No. PER-07/MBU/07/2015 tanggal 22 Mei 2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Berdasarkan PERMEN BUMN terakhir yaitu PER-09/MBU/07/2015 tanggal 03 Juli 2015, dana yang digunakan untuk kegiatan PKBL diambil dari penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/ Menteri pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina maksimum sebesar 4% dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya.
- b. Pada tanggal 16 Desember 2016 telah diterbitkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/12/2016 yang mulai diberlakukan mulai tahun buku 2017 atas perubahan peraturan No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, sebagai berikut:
 - Dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan bersumber dari penyisihan sebagian, laba bersih BUMN dan/ atau anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN.
 - Dana Program Kemitraan juga bersumber dari saldo dana Program Kemitraan yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015; jasa administrasi pinjaman/ margin/ bagi hasil, bunga deposito dan/ atau jasa giro dari dana Program Kemitraan; dan/ atau pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.
 - Dana Program Bina Lingkungan juga bersumber dari saldo dana BL yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015, hasil bunga deposito dan/ atau jasa giro dana Program BL yang tersisa dari dana Program BL tahun sebelumnya.
 - Besarnya dana Program Kemitraan dan Program BL yang bersumber dari laba bersih dan/ atau biaya paling banyak 4% dari proyeksi laba bersih tahun sebelumnya.
 - Bagi BUMN yang tidak memperoleh laba, besarnya dana Program Kemitraan dan dana Program BL ditetapkan paling banyak sama dengan besarnya dana Program Kemitraan dan dana Program BL tahun sebelumnya.
- c. Pada tahun tanggal 5 Juli 2017 telah diterbitkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/7/2017 yang diberlakukan mulai tahun buku 2017 atas perubahan kedua peraturan No. PER-03/MBU/12/2016 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, sebagai berikut:
 - BUMN Pembina dalam mengoptimalkan dan kelancaran pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, dapat bekerjasama dengan BUMN lain, anak perusahaan BUMN dan/atau perusahaan terafiliasi BUMN untuk penyaluran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN Pembina yang selanjutnya disebut penyalur.
 - Jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan dari Program Kemitraan paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
 - Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan sebesar 3% (tiga persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Rupiah Penuh)

- d. Pada bulan April 2020 telah diterbitkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/04/2020 yang mulai berlaku tanggal 2 April 2020 atas perubahan peraturan No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagai berikut:
- (a) Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL
 - (b) Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL
 - (c) BUMN Pembina dalam mengoptimalkan dan kelancaran pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL, dapat bekerjasama dengan BUMN lain, anak perusahaan BUMN, perusahaan terafiliasi BUMN dan/atau badan hukum yang telah didirikan oleh BUMN
 - (d) Dana Program BL disalurkan dalam bentuk :
 - bantuan bencana alam dan bencana non alam, termasuk yang disebabkan oleh wabah;
 - bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan;
 - bantuan peningkatan kesehatan;
 - bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
 - bantuan sarana ibadah;
 - bantuan pelestarian alam; atau
 - bantuan sosial kemasyarakatan untuk pengentasan kemiskinan, termasuk untuk:
 1. elektrifikasi;
 2. penyediaan sarana air bersih;
 3. penyediaan sarana sanitasi;
 4. bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan; promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan;
 5. perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu;
 6. bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan dan perikanan; atau
 7. bantuan peralatan usaha.
 - (e) Penggunaan dana Program BL yang disalurkan dapat dilakukan kepada internal BUMN sendiri untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya.
- e. Pada tanggal 8 April 2021 telah diterbitkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER 05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang mulai berlaku tanggal 20 April 2021 atas perubahan peraturan No. PER 09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagai berikut:
- (a) Jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan dari Program Pendanaan UMK adalah maksimal sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - (b) Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Pendanaan UMK menjadi sebesar 6% (enam persen) per tahun dengan jangka waktu/tenor pinjaman maksimal selama 3 (tiga) tahun.
 - (c) Sumber dana untuk Program Pendanaan UMK, selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - saldo dana Program Kemitraan yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015; dan/atau
 - jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana program kemitraan.
 - (d) Mengenai ketentuan peralihan, penyaluran program kemitraan dan program bina lingkungan yang dilaksanakan oleh BUMN atau BUMN penyalur yang sudah dilaksanakan dan belum selesai sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian pelaksanaan penyaluran program kemitraan dan program bina lingkungan dimaksud.
 - (e) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER 02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 341), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Rupiah Penuh)

- (f) Ada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 341), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

23. Tanggung Jawab atas Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil merupakan tanggung jawab pengurus dan telah disetujui oleh Kepala Program PUMK PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk diterbitkan pada tanggal 18 Februari 2022.



PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

JL. Perintis Kemerdekaan No. 1
Bandung 40117
PO Box 1163 Bandung 40000
Telp : 022-4230031,4230039
Teleks : 28263, 28358
Fax : 022-4203342 Toka 10039

Website : www.kai.id
Email : kontak_pelanggan@kereta-api.co.id